

## BAB V

### EPILOGUE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan penelitian terhadap 2 (dua) Kantor Akuntan Publik sebagai panggung sandiwara drama implementasi sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang dituangkan dalam bab IV, Penulis sebagai instrument kunci dalam penelitian ini dapat menyimpulkan sebuah makna yang tersimpan dibalik pertunjukan drama yang dibawakan oleh para aktor, baik yang memerankan peran Akuntan Publik, auditor, dan aktor-aktor pendukung diatas panggung Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan analisis subjektif reflektif yang dilakukan Penulis, makna yang terkandung dalam penelitian ini yaitu para aktor di Kantor Akuntan Publik masih berada dalam proses penyesuaian untuk mengimplementasikan sistem pengendalian mutu berdasarkan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) secara utuh dan menyeluruh. Mereka sebagai para aktor, menyesuaikan diri pada tuntutan peran ideal Akuntan Publik yang harus mengimplementasikan SPM 1 dalam setiap penugasan dengan cara melakukan usaha-usaha untuk membangun kesan bahwa pertunjukan telah berlangsung sesuai skenario SPM 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## B. Keterbatasan Penelitian

### © Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat sejumlah keterbatasan penelitian sebagai berikut:

Informan yang dijadikan sebagai sumber pembahasan dalam penelitian ini jumlahnya masih terbatas, yakni 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang masing-masing diwakili oleh satu orang informan Akuntan Publik. Namun karena keterbatasan waktu informan yang mempunyai berbagai keperluan mendadak, kemudian wawancara dilanjutkan di lain hari oleh seorang auditor di masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut. Oleh karena keterbatasan jumlah informan dan waktu yang diberikan, dikhawatirkan hasil wawancara belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dialami oleh Kantor Akuntan Publik.

Informan dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan Kantor Akuntan Publik. Sedangkan kalangan lain dari pihak Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai pengawas Kantor Akuntan Publik dan dewan SPAP tidak dijadikan informan. Hal ini disebabkan keterbatasan akses kepada sejumlah aktor sebagaimana tersebut di atas, keterbatasan waktu penelitian, serta keterbatasan lainnya.

Terbatasnya akses yang diberikan oleh para informan di masing-masing lokasi penelitian terhadap data dokumentasi yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu maupun Kertas Kerja Pemeriksaan *final* secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur dalam SPAP 1 yang dirumuskan IAPI terlalu banyak sehingga Penulis hanya menggunakan ketentuan umum setiap unsur pengendalian mutu dalam SPM 1 secara garis besar dan mengambil beberapa poin materi penerapan SPM 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. IAPI merumuskan Standar Profesional Profesi Akuntan Publik (SPAP) baru bagi Kantor Akuntan Publik yang setiap standarnya diselesaikan dan ditetapkan secara bertahap, termasuk untuk sistem pengendalian mutu berupa Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2013. Sehingga, penelitian berdasarkan SPM 1 seperti penelitian yang Penulis lakukan ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Penulis pun hanya sedikit mendapati penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik sebagai bahan referensi.

Analisis *back stage* dan *front stage* termasuk analisis hubungan antar aktor dilakukan dalam waktu singkat, yakni saat melakukan interaksi untuk wawancara serta pengamatan lapangan yang juga dilakukan dalam waktu singkat. Sebagai akibatnya, simpulan yang Penulis kemukakan terkait *back stage* masing-masing informan tersebut dapat mengandung bias.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Saran**

**Saran terkait Hasil Penelitian**

Rekomendasi yang Penulis sampaikan ini merupakan masukan yang mungkin dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kebaikan profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada umumnya. Beberapa hal yang Penulis rekomendasikan yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan otoritas yang berwenang atas praktek Kantor Akuntan Publik yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bisa lebih ditingkatkan lagi. Kebijakan terkait penjadwalan pemeriksaan rutin atas seluruh Kantor Akuntan Publik juga perlu dikaji ulang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. KAP “X” Jakarta yang memiliki kantor cabang dan berkedudukan sebagai kantor pusat seharusnya mengutamakan pelaksanaan pemantauan sistem pengendalian mutu, baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabangnya. Pelaksanaan pemantauan seperti yang disyaratkan dalam SPM 1 diharapkan dapat mengidentifikasi kendala maupun kelemahan pelaksanaan sistem pengendalian mutu yang dihadapi KAP “X” beserta cabang-cabangnya. Selanjutnya, diharapkan perbaikan-perbaikan bisa segera dirumuskan dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing kantor.
- c. KAP “Y” harus lebih memperhatikan keseragaman sistem pengendalian mutu yang diimplementasikan oleh semuanya parternya sebagai satu kesatuan Kantor Akuntan Publik bernama KAP “Y”.
- d. Prosedur rekrutmen di KAP “Y” seharusnya tidak hanya melalui interview oleh partner saja. Tes tertulis juga sebaiknya diterapkan oleh KAP “Y” ini supaya tujuan rekrutmen dalam SPM 1 dapat tercapai yaitu para auditor memiliki kompetensi dan kemampuan memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Tes ini sebaiknya didesain untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan teknis setiap calon auditor untuk menghindari diterimanya auditor yang kurang kompeten kedalam suatu tim audit.
- e. Dokumentasi keseluruhan unsur sistem pengendalian mutu sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh masing-masing Kantor Akuntan Publik, seperti:
  - (1) Dokumentasi independensi di KAP “X” harus dibuat untuk semua jenis perikatan audit yang diterima sebagai representasi bahwa seluruh anggota tim menjalankan ketentuan etika yang berlaku.
  - (2) Pendokumentasian unsur Sumber Daya Manusia dalam Kantor Akuntan Publik di penelitian ini harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa menjadi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*track record* setiap staff yang bekerja di Kantor Akuntan Publik tersebut.

Tugas pendokumentasian dan pengarsipan ini bisa disosialisasikan dan menjadi tanggung jawab bagian administrasi dan umum masing-masing Kantor Akuntan Publik.

- (3) Sebaiknya disemua Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini, proses konsultasi lebih banyak didokumentasikan secara tertulis. Dokumentasi tersebut hendaknya bisa menjelaskan siapa yang memberi dan menerima masukan dalam konsultasi tersebut serta pokok masalah dan solusi yang dihasilkan dari konsultasi. Dokumentasi konsultasi, termasuk penelaahan pengendalian mutu perikatan bisa menjadi bahan referensi Kantor Akuntan Publik bila menerima penugasan dari klien yang berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan masing-masing Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini sebaiknya dibuatkan dokumentasinya.

- f. Penulis menyarankan KAP “X” merumuskan prosedur terkait sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan loyalitas karyawan untuk mengatasi tingginya *turn over* karyawan yang terjadi. KAP “X” sebaiknya mempunyai lembar evaluasi kinerja secara tertulis untuk para staf, terutama staf audit. Selain untuk mengetahui potensi masing-masing staff, evaluasi bisa digunakan sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan promosi jabatan ataupun pemberian *reward*. Sehingga, karyawan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan evaluasi kinerja, bisa mendapatkan kompensasi diluar kenaikan gaji. Kebijakan evaluasi kinerja beserta kompensasi ini bisa disosialisasikan ke karyawan dan dibarengi dengan pemberian motivasi kepada setiap karyawan untuk semakin meningkatkan kompetensi profesional dan kinerja mereka.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. KAP “Y” sebaiknya memperjelas lagi jenjang jabatan yang diterapkan beserta tugas dan tanggung jawab di masing-masing jabatan. Hal ini berkaitan dengan kosongnya posisi manajer KAP “Y” dimana seharusnya partner bisa melakukan pendelegasian tanggungjawab kepada manajer audit yang baru. Tanggungjawab pada posisi manajer bisa didelegasikan kepada auditor dibawahnya yakni supervisor. Ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi *miss communication* dan *double job* yang menyebabkan *internal control* Kantor Akuntan Publik tidak berfungsi dengan baik.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Berikut adalah sejumlah rekomendasi yang Penulis ajukan kepada peneliti dimasa mendatang yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini:

- a. Peneliti yang akan datang dapat menambah jumlah informan penelitian melalui wawancara dan/atau kuesioner atau menambah keragaman situs penelitian, misalnya dengan menjadikan salah satu Kantor Akuntan Publik *big four* bersama dengan Kantor Akuntan Publik *non big four* sebagai situs penelitian untuk meningkatkan kredibilitas dan relevansi data.
- b. Peneliti yang akan datang dapat memperluas latar belakang informan sehingga tidak terbatas pada Akuntan Publik namun dapat mencakup Dewan SPAP, otoritas pengawas Kantor Akuntan Publik (PPPK), dan pihak-pihak terkait.



- c. Peneliti yang akan datang dapat membuat *checklist interview* lebih banyak lagi seperti yang termuat dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) untuk semakin memperdalam pemahaman apakah sistem pengendalian mutu yang sesuai pedoman SPM 1 dari IAPI telah diimplementasikan Kantor Akuntan Publik.
- d. Peneliti yang akan datang dapat melihat langsung baik dokumentasi sistem pengendalian mutu maupun Kertas Kerja Pemeriksaan secara keseluruhan yang dibuat oleh setiap Kantor Akuntan Publik yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa auditor telah benar-benar mendokumentasikan unsur-unsur sistem pengendalian mutu dalam setiap penugasan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.